

Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Vale Indonesia di Sorowako

Sawedi Muhammad¹, Mansyur Radjab², Rahmat Muhammad³

Sociology Department, Political & Social Science Faculty,
Hasanuddin University

Email: ¹msawedi@yahoo.com; ²mansyurradjab@yahoo.co.id

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has played strategic roles in mining industries in Indonesia over the last two decades. CSR contributes not only to improve basic physical infrastructures of local communities such as roads, bridges, health-center, schools and libraries but also to accommodate the needs of indigenous people in preserving and promoting their local art and culture. Some companies have been advancing their CSR roles to actively participate in mitigating the potential of trans-community conflict in their operation areas – a daunting task but worth executing – to ensure a sustained both social and government license to operate. The paper is aimed at unraveling CSR contribution of PT Vale Indonesia in transforming multicultural communities in its operation and what roles the company played in mitigating social conflict on the ground. The study finds out that company CSR management, which has adopted transparent, accountable and participatory methodologies have effectively improved the quality of life of local communities. The study also reveals that applying participatory methodologies in CSR management is not only enhance community participation in project-based, but also increase their awareness in mitigating social conflict in multicultural communities.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR) management; multicultural communities; conflict resolution; PT Vale Indonesia.

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) telah memainkan peran strategis dalam industri pertambangan di Indonesia selama dua dekade terakhir. CSR berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan infrastruktur fisik dasar masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, pusat kesehatan, sekolah dan perpustakaan tetapi juga untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dalam melestarikan dan mempromosikan seni dan budaya lokal

mereka. Beberapa perusahaan telah memajukan peran CSR untuk secara aktif berpartisipasi dalam mengurangi potensi konflik antar-komunitas di wilayah operasi mereka – tugas yang menakutkan tetapi harus dijalankan – untuk memastikan tanggungjawab sosial dan pemerintah yang berkelanjutan dalam beroperasi. Makalah ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi CSR PTq` Vale Indonesia dalam mengubah masyarakat multikultural dan peran apa yang dimainkan perusahaan dalam meredakan konflik sosial di lapangan. Studi ini menemukan bahwa manajemen CSR perusahaan, telah mengadopsi metodologi yang transparan, akuntabel dan partisipatif, serta secara efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Studi ini juga mengungkapkan bahwa penerapan metodologi partisipatif dalam manajemen CSR tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek berbasis, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka dalam mengurangi konflik sosial di komunitas multikultural.

Kata kunci: Corporate social Responsibility (CSR), komunitas multikultural, resolusi konflik, PT Vale Indonesia.

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi kewajiban hukum di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memperkuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana dalam pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan CSR perusahaan bagi BUMN. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor mineral dan batu bara, UU No. 4 Tahun 2009 menjadi payung hukum yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan CSR.¹

Karenan tuntutan pasar global akan sumber daya alam semakin meningkat tajam, maka sektor pertambangan mineral dan batu bara menjanjikan keuntungan yang melimpah. Akan tetapi tesis tentang kutukan sumber daya alam (*resource curse*) menegaskan bahwa keberlimpahan sumber daya alam mendatangkan serangkaian resiko

¹ Kristina Großmann, Martina Padmanabhan, dan Katharina von Braun, "Contested Development in Indonesia: Rethinking Ethnicity and Gender in Mining," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 1 (2017): 11–28.

distorsi ekonomi dan politik yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap timbulnya konflik-konflik sosial di lingkar tambang.² Manfaat dari sektor pertambangan terhadap penduduk, khususnya masyarakat lokal (*indigenous community*) dapat dilihat dari kontribusi perusahaan terhadap tumbuh kembangnya perusahaan setempat (*local suppliers*) dan ketersediaan tenaga kerja bagi angkatan kerja lokal. Akan tetapi penilaian akan dampak sebuah industri terhadap pembangunan akan sangat tergantung terhadap perspektif yang digunakan. Pilihan atas perspektif tertentu akan berdampak langsung terhadap kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang berkuasa. Dampaknya tentu berimplikasi terhadap pendekatan, model dan kebijakan yang akan diputuskan. Setiap perspektif tentu memiliki orientasi spesifik tentang masa lalu dan masa depan. Ia juga memiliki konsepsi khusus tentang filosofi keilmuan dan epistemologi. Peran sumber daya alam dalam pembangunan secara fundamental menjadi pembeda antara satu perspektif dengan perspektif lainnya.³

Perbedaan sangat tajam antara perspektif pembangunan ekonomi yang sangat permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam dengan perspektif ekologis yang sangat protektif terhadap kelestarian dan kelangsungan ekologis. Dari pertentangan inilah kemudian melahirkan kompromi yang menjembatani perbedaan keduanya yaitu perpspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perpspektif ini diposisikan sebagai jalan tengah dimana pembangunan diartikan sebagai upaya menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kepentingan generasi berikutnya.⁴

Dari sinilah titik berangkat tuntutan komunitas global agar perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam melaksanakan kewajiban CSR seiring dengan semakin kuatnya desakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCC) yang merupakan prinsip *fairness, transparency* dan *accountability*.⁵ Akan tetapi,

² Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner, "Natural Resources and Economic Development, The Curse of Natural Resources," *European Economic Review* 45 (2001): 827-38.

³ Michael Ellsworth Colby, "Ecology, economics, and social systems: The evolution of the relationship between environmental management and development" (University of Pennsylvania, 1990).

⁴ Robert W. Kates, Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz, "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice," *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47, no. 3 (April 2005): 8-21, doi:10.1080/00139157.2005.10524444. Lihat juga: World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (OCF), Reprinted (Oxford: Oxford University Press, 2009).

⁵ Ginting Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas* (UU No. 40 Tahun 2007) (Bandung: PT

meskipun perusahaan telah melaksanakan kewajiban CSR sebagai insentif untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di lingkaran tambang, keberhasilannya masih diperdebatkan. Kebanyakan program CSR memprioritaskan proyek infrastruktur yang umumnya tidak menyentuh kepentingan kelompok masyarakat yang paling rentan.⁶

Salah satu isu krusial dalam penerapan CSR di Indonesia adalah relasi antara perusahaan dengan penduduk asli relatif lebih konfrontatif ketimbang kompromistis. Penduduk asli seringkali terlibat pertentangan tajam dengan perusahaan, bahkan banyak diantaranya berujung dengan tindakan kekerasan yang merugikan keduanya. Perusahaan seperti PT Freeport, PT Newmont, Kaltim Prima Coal (Bumi Resource) serta perusahaan lainnya telah mengalami pasang surut hubungan dengan masyarakat lokal kaitannya dengan isu CSR. Wilayah pertambangan yang dihuni oleh masyarakat yang multikultur seperti PT Vale Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Dalam melaksanakan program CSR perusahaan sangat hati-hati agar isu etnisitas, agama dan politik tertangani dengan baik sehingga program CSR menjadi medium perekat dan mitigasi potensi konflik komunal.

Tulisan ini akan menelusuri bagaimana model, pendekatan CSR yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia yang sampai saat ini relatif berhasil menjaga hubungan baik dengan masyarakat di lingkaran tambang sehingga izin sosial beroperasi (*social license to operate*) dapat diperoleh dan dipertahankan dengan baik. PT Vale adalah perusahaan tambak nikel terbesar di Indonesia yang merupakan subsidiari dari Vale Brazil. Perusahaan ini awalnya dimiliki oleh Inco Limited, Canada yang untuk pertama kalinya beroperasi di Indonesia setelah Kontrak Karyanya (KK) di tandatangani pada tahun 1967. Selama beroperasi, perusahaan ini mengalami pasang surut relasi dengan masyarakat lokal seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun 1967-1998, perusahaan memilih pendekatan dari atas ke bawah (*bottom up*) dalam melancarkan operasi bisnisnya baik dari aspek pemerintahan (*government license*) maupun dari hubungan kemasyarakatan (*social license*).

Terdapat beberapa hal yang membuat penulis tertarik menganalisis bagaimana tata kelola CSR PT Vale dalam meredam konflik sosial di lingkaran tambangnya. Pertama, sejak penandatanganan KK tahap I perusahaan sudah berhadapan-hadapan dengan masyarakat perih

Citra Aditya Bakti, 2007), 94.

⁶ M. Welker, *Enacting the Corporation. An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 2014).

klaim suku karunsi'e yang menganggap tanah ulayatnya dicaplok oleh perusahaan. Suku karunsi'e adalah penduduk asli yang terusir dari tanah ulayatnya ketika terjadi pemberontakan DI-TII Kahar Muzakkar di Suawesi-Selatan tahun 1950-an. Klaim suku Karunsi'e sampai artikel ini ditulis belum menemukan penyelesaian yang diterima semua pihak, tetapi izin beroperasi perusahaan dari komunitas tidak mengalami gangguan. Kedua, Wilayah lingkar tambang PT Vale Indonesia di samping sangat luas (empat kecamatan), juga dihuni oleh berbagai macam suku, agama dan aliran kepercayaan. Meskipun beberapa kali wilayah operasionalnya terancam konflik antara suku, atas kerjasama yang baik dengan semua pihak, konflik-konflik itu dapat teratasi dengan baik. Ketiga, pelaksanaan program-program CSR perusahaan baru dilaksanakan setelah reformasi 1998. Itu pun melalui demonstrasi besar-besaran dan diwarnai drama penyanderaan eksekutif perusahaan oleh sekelompok masyarakat yang terhimpun ke dalam organisasi Kerukunan Warga Asli (KWAS). Keempat, meski sering terjadi demonstrasi dari masyarakat terhadap perusahaan, tidak banyak demonstrasi yang berdampak terhadap bisnis perusahaan. Alasan-alasan inilah yang membuat penulis ingin mendalami lebih jauh keunikan pelaksanaan CSR PT Vale yang sampai saat ini mampu mengamankan izin sosial beroperasi dari masyarakat di lingkar tambang.

B. Tinjauan Pustaka

CSR memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda. Bowen mendefinisikan CSR sebagai: *"the obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action that are desirable in terms of objectives and values of our society."*⁷ Bowen secara implisit menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁸ Carroll⁹ berpendapat bahwa CSR memiliki cakupan luas melampaui isu ekonomi, hukum, etika dan harapan-harapan yang masyarakat miliki terhadap perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini meliputi keseluruhan tanggung jawab sebuah perusahaan. CSR dengan demikian diartikan sebagai cara perusahaan mengelola operasi bisnisnya sehingga berdampak positif terhadap masyarakat.¹⁰

⁷ Howard R. Bowen, *Social Responsibilities of the Businessman* (New York: Harper and Row, 1953).

⁸ Ibid.

⁹ Archie B. Carroll, "A three-dimensional conceptual model of corporate performance," *Academy of management review* 4, no. 4 (1979): 497-505.

¹⁰ Rosley Anholon et al., "Assessing Corporate Social Responsibility Concepts

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR adalah komitmen berkelanjutan dunia bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi komunitas lokal serta masyarakat luas, pada saat yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan keluarganya.¹¹ Untuk keperluan klasifikasi yang layak, penulis menyusun hipotesis yang paling relevan tentang pendekatan atau teori CSR yang fokus kajiannya mengikuti salah satu realitas sosial: ekonomi, politik, integrasi sosial dan etik. Inspirasi dari hipotesis ini didasari oleh empat hal yang menurut Parsons dapat diamati di hampir semua sistem sosial: adaptasi terhadap lingkungan (sumber daya alam dan ekonomi), pencapaian tujuan kaitannya dengan politik, integrasi sosial dan pemeliharaan pola (*pattern maintenance*) atau latensi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kebudayaan.¹² Rumusan Parsons ini biasa juga dikenal dengan konsep AGIL (*adaptation, goal attainment, integration and latency*).

B.1. Evolusi konsep CSR

Menurut Visser, terdapat lima periode terjadinya evolusi CSR yang secara ekonomi saling tumpang tindih: masa keserakahan (*greed*), filantropi, pemasaran, manajemen dan responsibiliti. Masing-masing dari periode tersebut mewujudkan tahapan CSR kedalam tahapan yang berbeda: defensif, karitatif, promosional, strategis dan transformatif.¹³ Pertama (1) adalah periode keserakahan. Pada tahapan ini CSR dilakukan secara defensif. Keseluruhan praktik CSR berlangsung sangat terbatas – hanya dilakukan pada saat – atau dapat memperlihatkan bahwa terdapat keuntungan bagi pemegang saham. Kedua (2) CSR karitatif di tahapan filantropis dimana perusahaan melaksanakan berbagai macam program sosial dan donasi terhadap masalah penanggulangan dampak lingkungan dan bantuan sponsorsip. Ketiga (3) promosi CSR dalam bingkai pemasaran. Pada tahapan ini program CSR dilihat semata sebagai peluang pencitraan (*branding*) dan arena untuk memperoleh nama baik perusahaan di mata publik (*public relations*). Keempat (4) CSR sebagai instrumen

Used by a Brazilian Manufacturer of Airplanes: a case study at Embraer," *Journal of Cleaner Production* 135, no. 1 (November 2016): 740–49.

¹¹ Richard Holme dan Philip Watts, *Corporate social responsibility: making good business sense* (Conches-Geneva, Switzerland: World Business Council for Sustainable Development, 2000).

¹² T. Parsons, "An Outline of the Social System," in *Theories of Society*, ed. oleh T. Parsons et al. (New York: Free Press, 1961).

¹³ Wayne Visser, "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility," *CSR International Inspiration Series*, no. 8 (2010).

strategis dalam bingkai manajemen. Pada tahapan ini keseluruhan program CSR dikaitkan dengan bisnis utama dari perusahaan. Kelima (5) CSR yang transformatif. Pada tahapan ini keseluruhan aktifitas CSR difokuskan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah dari persoalan yang selama ini dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Biasanya program diarahkan untuk menemukan model bisnis, merevolusi prosesnya, peningkatan kualitas produk dan pelayanan serta lobi intensif untuk memperoleh dukungan kebijakan yang progresif di level nasional dan internasional. Dalam tahapan ini CSR difokuskan di tingkatan mikro melalui dukungan terhadap isu sosial dan lingkungan dan mensinergikan dengan strategi perusahaan. CSR transformatif berfokus pada pemahaman atas keterkaitan sistem di level makro dengan masyarakat dan ekosistemnya serta menyesuaikan strategi untuk memaksimalkan dampak yang lebih besar terhadap manusia dan sistem ekologisnya.¹⁴

Tabel 1: The Ages and Stages of CSR¹⁵

Business Age	Stage of CSR	Modus Operandi	Key Enabler	Stakeholder target
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government and employee
Philantropy	Charitable	Community programmes	Projects	Community
Marketing Management	Promotional Strategic	Public relations Management system	Media Codes	General public Shareholders, NGOs/CSOs
Responsibility	Transformative	Business models	Products	Regulator & customers

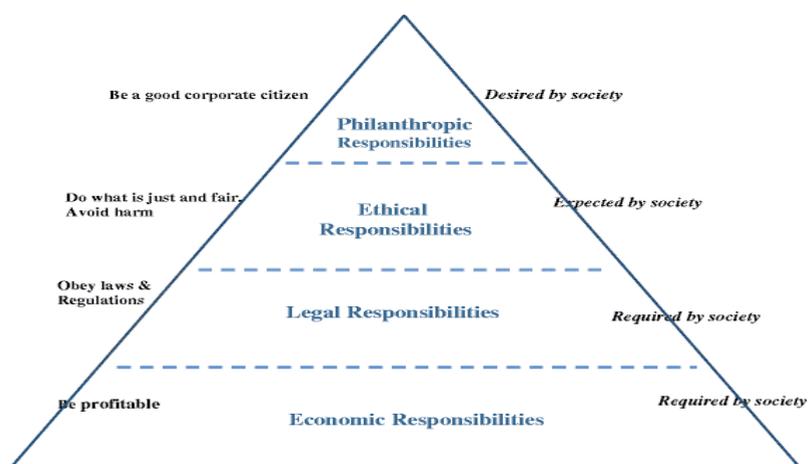
B.2. Model CSR

Caroll memaparkan perbedaan di antara berbagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁶

¹⁴ Reza Safar zad, Ehsan Farahnaki, dan Mohamad Farahbakhsh, "Corporate Social Responsibility, Theories and Models," *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology* 5, no. 1 (2017): 38–44.

¹⁵ Visser, "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility."

¹⁶ Archie B. Carroll, "The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders," *Business horizons* 34, no. 4 (1991): 39–48.



Gambar 1. Piramida CSR Carroll (1991)¹⁷

Piramida Carroll menggambarkan hirarki pertanggungjawaban dari ekonomi ke hukum melalui orientasi yang lebih sosial dari tanggung jawab etik dan filantropis. Carroll menegaskan bahwa institusi bisnis merupakan unit dasar ekonomi di masyarakat yang karena sifat dasarnya memiliki tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab paling mendasar dari korporasi, yang mencerminkan sifat dasarnya sebagai organisasi yang mencari keuntungan. Tanggung jawab ekonomi ini menegaskan bahwa masyarakat berharap dunia usaha menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan darinya sebagai insentif atau imbalan terhadap efisiensi dan efektivitas usaha. Tanggung jawab hukum mensyaratkan kepatuhan hukum dan bermain berdasarkan aturan main yang berlaku. Dari perspektif ini, masyarakat mengharapkan korporasi mencapai misi ekonominya di dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

B.3. Teori integratif

Teori ini melihat bagaimana bisnis terintegrasi dengan tuntutan sosial dengan argumen dasar bahwa bisnis tergantung pada masyarakat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mohamed A. Omran dan Ramdhony D., "Theoretical Perspective on Corporate Social Responsibility Disclosure," *A Critical Review International Journal of Accounting and Financial Reporting* 5, no. 2 (2015).

agar tetap eksis, tumbuh dan berkelanjutan. Tuntutan sosial secara umum dianggap sebagai jalan dimana masyarakat berinteraksi dengan dunia usaha dan memberinya prestise dan legitimasi tertentu. Sebagai konsekuensinya, manajemen korporasi harus memperhatikan tuntutan sosial dan mengintegrasikannya sedemikian rupa sehingga usaha berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, muatan tanggung jawab dunia usaha dibatasi oleh ruang dan waktu dimana setiap situasi tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat saat itu.¹⁹ Dengan kata lain, tidak terdapat langkah-langkah spesifik yang harus diambil manajemen dunia usaha di sepanjang waktu dan di setiap industri. Pada dasarnya, teori ini terfokus pada deteksi dan pelacakan terhadap tuntutan sosial dalam upaya mencapai legitimasi, prestise dan penerimaan sosial yang lebih besar.²⁰

C. Metodologi

Tulisan ini menggunakan metode review berbagai literatur dan telaah kritis baik jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan kajian CSR. Penulis tidak menjelaskan masing-masing teori dan model CSR secara detail, meski pada akhirnya akan menjadikan teori yang direview sebagai dasar untuk mendiskusikan dan menganalisis temuan tentang implementasi CSR PT Vale Indonesia.

D. CSR PT. Vale Indonesia

Berdirinya PT. Vale Indonesia (PT Vale) sebagai raksasa tambang nikel dunia diawali dengan keberadaan pendahulunya, PT International Nickel Indonesia, Tbk (PT Inco). Secara garis besar, keberadaan perusahaan ini terdiri beberapa periode (lihat tabel 2).

Dasar hukum beroperasinya PT. Inco, Tbk adalah Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Juli 1968 di lahan seluas 6,6 juta hektar yang mencakup beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Dari total luasan itu –sampai tahun 1979– perusahaan secara bertahap mengembalikan sebagian wilayah itu kepada pemerintah. Luas wilayah KK hingga akhir

¹⁹ Lee E. Preston dan James E. Post, *Private Management and Public Policy: Principle of Public Responsibility*, The Prentice-Hall series in economic institutions & social systems (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975).

²⁰ Garriga Elisabeth dan Mele Domènec, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory," *Journal of Business Ethics* 53 (2004): 51-57.

2012 menciut diangka 190.510 hektar, dengan cakupan terbesar di wilayah tambang Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, seluas 118.387,4 hektar. Dari luasan tersebut, 72.437 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan 2.139,8 hektar adalah kawasan hutan konservasi. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.41/2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan, perusahaan dapat meneruskan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung hingga akhir masa KK (Sustainability Report, Vale, 2012).

Tabel 2: Periode dan peristiwa penting PT Vale Indonesia.²¹

Periode	Tahapan/peristiwa
1968-1973	Eksplorasi dan studi kelayakan
1973-1978	Pembangunan fasilitas pertambangan dan pabrik produksi
1978-1986	Masa produksi dengan kerugian
1987-2004	Produksi dengan keuntungan dan perluasan
2005-2006	Periode transisi dari PT Inco ke PT Vale
2006-Sekarang	Periode PT Vale – keuntungan berkelanjutan

Lokasi atau kawasan terdampak operasi atau wilayah pemberdayaan PTVI berada di kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya, PTVI telah menetapkan lokasi atau wilayah pemberdayaan yang meliputi empat kecamatan yaitu: Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha.

Tabel 3. Luas wilayah terdampak operasi PTVI²²

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (km²)
1.	Malili	17	921,20
2.	Nuha	6	808,27
3.	Towuti	16	1,820,46
4.	Wasuponda	6	1,244,00

²¹ M. Dahlan Abubakar, Asdar Muis RMS, dan Joko Susilo, *Inco Mengalir di Tengah Gejolak Pertambangan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007). Sawedi Muhammad, *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco* (Makassar: Innawa, 2017).

²² PT Vale Indonesia Tbk, *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*, 2013.

Dilihat dari segi keberagaman etnisitas dan keyakinan bergama, wilayah terdampak operasi perusahaan memiliki keunikan tersendiri karena begitu banyak suku bangsa dan pemeluk agama yang berdomisili di wilayah ini. Penduduk asli wilayah di sekitar pertambangan adalah berasal dari rumpun suku Mori dari Sulawesi Tengah. Dalam salah satu dokumen komunitas Pado'e, Karunsi'e dan Tambe'e, adalah empat anak suku yang meninggalkan suku Mori yaitu To Molioa/Dodoe, To Ulu-Uwoi, To Watu dan To Ngusu Mbatu/Tinompo.²³ Seiring dengan massifnya migrasi dan mobilisasi penduduk setelah perusahaan beroperasi di awal tahun 70an, pembauran lintas etnis dan agama terjadi begitu intens yang menyebabkan wilayah terdampak operasi perusahaan menjadi masyarakat yang heterogen.

Tabel 4. Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan²⁴

Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Malili	36,581	197	2,205	512	0	0	39,495
Towuti	23,902	1,037	6,363	110	0	1	31,413
Nuha	18,377	489	3,782	116	4	0	22,768
Wasuponda	12,984	1,255	7,089	25	1	2	21,356
Jumlah	91,844	2,978	19,439	763	5	3	115,032

D.1. Model dan Pendekatan CSR PT Vale Indonesia (PTVI)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penambangan dan pengolahan biji nikel terbesar di Indonesia, PTVI berkewajiban melaksanakan program-program CSR sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Perusahaan berkomitmen dalam membangun perekonomian daerah melalui berbagai fasilitas pendanaan dan dukungan program terhadap pemerintah daerah untuk mengembangkan masyarakat di empat wilayah kecamatan terdampak operasi langsung, yaitu: Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Malili. Secara khusus, PTVI mendukung program sektor utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur perdesaan. Pada tahun 2012 keempat sektor tersebut telah dialokasikan dana: Sektor Pendidikan Rp. 12,7 miliar, atau sekitar 25 persen, Sektor Kesehatan sebesar Rp. 12,7 miliar atau sekitar 25 persen, Sektor Perikanan

²³ Muhammad, *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco*.

²⁴ PT Vale Indonesia Tbk, *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*.

dan Pertanian sebesar Rp. 18,2 miliar atau sekitar 35 persen, dan sisanya untuk program infrastruktur.

Besarnya alokasi dana tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan pemantauan dari berbagai pihak agar memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengukur efektivitas dukungan PTVI terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka PTVI telah melakukan pemetaan awal terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan serangkaian kajian (assessment) yang dilakukan oleh tim Universitas Negeri Makassar tentang pemetaan pendidikan serta A+ CSR Indonesia tentang *stakeholder mapping* dan *community need assessment* (CNA).

Program CSR PTVI dikemas dalam bentuk Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah terdampak operasi PTVI. Secara operasional, PMDM menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipatif, kemandirian, akuntabilitas, keterpaduan, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program ini dibangun melalui proses pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Prinsip-prinsip pelaksanaan program PMDM adalah: *Pertama*, keberpihakan kepada masyarakat yang rentan dan miskin. Orientasi baik dalam proses dan pemanfaatan ditujukan bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi secara memadai. *Kedua*, keberpihakan kepada perempuan. PMDM mengutamakan keberpihakan terhadap perempuan terutama dari kalangan kelompok rentan dan miskin dengan memberikan akses atau kesempatan yang luas terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. *Ketiga*, bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia. PMDM memilih kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi lebih diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bukan berorientasi pada pembangunan fisik semata. *Keempat*, partisipasi. Program PMDM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi termasuk kelompok yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi dalam setiap tahapan kegiatan. *Kelima*, akuntabilitas. Dalam setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat atau kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara moral,

teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI. *Keenam*, Transparansi. Masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan terkait program PMDM. Seluruh kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang berdomisili di desa dan kecamatan mengetahui dan memahami dan berperan dalam mekanisme pelaksanaan PMDM.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, PTVI menegaskan aturan main mengenai jenis kegiatan yang dilarang (*negative lists*). Tujuannya adalah agar CSR dapat memberi kontribusi maksimal terhadap terciptanya transformasi kualitas sumber daya manusia dan bermanfaat dalam memitigasi potensi konflik sosial di lingkar tambang yang dihuni oleh masyarakat yang multi-kultur. Berikut beberapa jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui program CSR: (1) Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik praktis/partai politik dan militer/angkatan bersenjata, (2) Pembangunan atau rehabilitasi bangunan rumah tinggal, kantor pemerintah dan tempat ibadah, (3) Pembelian barang atau bahan yang dapat merusak lingkungan seperti senjata, bahan peledak, asbestos, pestisida, dan obat-obatan terlarang, (4) Pembiayaan gaji atau honorarium bagi pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan PTVI, (5) Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak di bawah usia kerja, (6) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barang terlarang, (7) Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas yang telah ditetapkan sebagai cagar alam atau kawasan lindung, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait, (8) Kegiatan pengolahan tambang, (9) Pengambilan dan penggunaan terumbu karang dan biota yang dilindungi, (10) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur alur sungai dan (11) Pembangunan jaringan irigasi baru yang lebih dari 50 Ha (PT. Vale Indonesia, 2013).

E. Dampak CSR PTVI

Melalui prinsip keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan, keberpihakan pada perempuan, bertumpu pada pembangunan sumber daya, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan kemandirian, PTVI berhasil melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan. Pada tahun 2015, sebanyak 43.295 orang menerima manfaat dari program ini, dengan biaya total untuk kesehatan Rp. 4.150.000.000. Biaya lainnya yaitu untuk bidang ekonomi sebesar Rp. 5.810.000.000, bidang pendidikan

Rp. 3.320.000.000, serta bidang pengembangan kapasitas masyarakat sebesar Rp. 3.320.000.000. Selain itu, PTVI juga memberikan pelatihan *life skill* pertanian, kewirausahaan dan administrasi kepada 4.159 orang.

Meski begitu banyak program yang telah diinvestasikan perusahaan melalui PMDM, masih saja terdapat keluhan masyarakat terkait keberadaan perusahaan.

Tabel 5. Keluhan masyarakat dan Resolusinya (Sustainability Report PTVI, 2015).

No.	Bentuk keluhan	Pelapor	Penyelesaian
1.	Penerimaan karyawan	LSM dan Forum Lokal	Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten
2.	Penerimaan karyawan melalui outsourcing HCOG	LSM dan Forum Lokal	Transparansi melalui Pelibatan Forum Pemuda dalam pengawasan
3.	Lahan tergenang di pesisir Danau Towuti	Masyarakat Towuti	Mediasi oleh pemerintah kabupaten
4.	Proses perubahan program Community Development	Forum masyarakat, LSM	Penguatan sosialisasi dan pembentukan komite desa
5.	Penguasaan lahan konsesi perusahaan oleh masyarakat petani lada	Forum masyarakat, LSM	Penyelesaian melalui jalur hukum

F. CSR dan Izin Sosial Beroperasi

Pelaksanaan CSR perusahaan yang massif tetapi terstruktur dan terencana dengan baik terbukti menjadi penangkal terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Meski sering terjadi demonstrasi masyarakat atas kebijakan-kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan mereka, konflik tersebut tidak sampai mengancam kelangsungan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Demikian pula potensi konflik horizontal diantara berbagai macam etnis, agama baik karyawan maupun warga lokal, kerukunan ummat beragama dan komunikasi diantara berbagai macam elemen masyarakat berlangsung sangat kondusif. Hal ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan CSR perusahaan yang tidak memberikan bantuan khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan, atau memberikan keistimewaan terhadap suku tertentu. Salah satu program yang terbukti paling efektif meredakan konflik adalah dibentuknya forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) atas fasilitasi dari perusahaan. Forum terbentuk di tahun 2005 atas inisiatif dari perusahaan yang anggotanya berasal dari tokoh-tokoh agama yang ada di kabupaten Luwu Timur. Tokoh-tokoh

agama ini melakukan kegiatan rutin berupa dialog bulanan, pelatihan-pelatihan resolusi konflik, studi banding di berbagai wilayah di Indonesia, serta saling kunjungan di saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Dengan demikian, keakraban terjalin diantara tokoh-tokoh agama yang memudahkan mereka saling berkomunikasi secara instan dalam kondisi apa pun.

G. Kesimpulan

Pelaksanaan CSR PTVI telah mengikuti kaidah-kaidah yang memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan. Manajemen CSR PTVI sangat relevan dengan konsepsi Visser (2010), yaitu CSR yang transformatif. Pada tahapan ini keseluruhan aktifitas CSR difokuskan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah dari persoalan yang selama ini dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Sistem CSR PTVI secara terus menerus mengalami transformasi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait. Kerangka pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, telah menghasilkan perencanaan program 5 tahunan yang tertata dengan baik. Sistem monitoring dan evaluasi serta sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga sangat tegas diatur dalam buku panduan yang telah disosialisasikan ke segenap pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, CSR PTVI telah memasuki tahapan filantropis sebagaimana yang ditegaskan oleh Carroll (1991). Evolusi pelaksanaan CSR PTVI perlahan merangkak dari tahapan mencapai target ekonomi (profit) kemudian patuh dan taat terhadap kewajiban-kewajiban hukum (*compliance*) dan terus bergerak melampaui aspek-aspek etika dalam berbisnis. Pada akhirnya, CSR PTVI mencapai tahapan filantropis-transformatif yang menurut Carroll (1991) dan juga Visser (2010) merupakan tahapan tertinggi dari implementasi CSR yang berkelanjutan. Model CSR seperti ini juga sejalan dengan konsepsi integratif dari Preston dan Post (1975) dimana perusahaan secara serius mengintegrasikan tuntutan sosial masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang dilakukannya. Dengan demikian maka terciptalah pola interaksi dan komunikasi yang saling memahami dalam kerangka fungsional berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsons (1961). PTVI berhasil beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya melalui integrasi sosial-kultural dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. Dahlan, Asdar Muis RMS, dan Joko Susilo. *Inco Mengalir di Tengah Gejolak Pertambangan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Anholon, Rosley, Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, Walter Leal Filho, Jefferson deSouza Pinto, dan Alexander Fehe. "Assessing Corporate Social Responsibility Concepts Used by a Brazilian Manufacturer of Airplanes: a case study at Embraer." *Journal of Cleaner Production* 135, no. 1 (November 2016): 740-49.
- Bowen, Howard R. *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper and Row, 1953.
- Carroll, Archie B. "A three-dimensional conceptual model of corporate performance." *Academy of management review* 4, no. 4 (1979): 497-505.
- — —. "The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders." *Business horizons* 34, no. 4 (1991): 39-48.
- Colby, Michael Ellsworth. "Ecology, economics, and social systems: The evolution of the relationship between environmental management and development." University of Pennsylvania, 1990.
- Elisabeth, Garriga, dan Mele Domènec. "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory." *Journal of Business Ethics* 53 (2004): 51-57.
- Großmann, Kristina, Martina Padmanabhan, dan Katharina von Braun. "Contested Development in Indonesia: Rethinking Ethnicity and Gender in Mining." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 1 (2017): 11-28.
- Holme, Richard, dan Philip Watts. *Corporate social responsibility: making good business sense*. Conches-Geneva, Switzerland: World Business Council for Sustainable Development, 2000.
- Jamin, Ginting. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kates, Robert W., Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz. "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47, no. 3 (April 2005): 8-21. doi:10.1080/00139157.2005.10524444.
- Muhammad, Sawedi. *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco*. Makassar: Inninawa, 2017.

- Omran, Mohamed A., dan Ramdhony D. "Theoretical Perspective on Corporate Social Responsibility Disclosure." *A Critical Review International Journal of Accounting and Financial Reporting* 5, no. 2 (2015).
- Parsons, T. "An Outline of the Social System." In *Theories of Society*, diedit oleh T. Parsons, E.A. Shils, K.D. Naegle, dan J.R. Pitts. New York: Free Press, 1961.
- Preston, Lee E., dan James E. Post. *Private Management and Public Policy: Principle of Public Responsibility*. The Prentice-Hall series in economic institutions & social systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975.
- PT Vale Indonesia Tbk. *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*, 2013.
- — —. *Panduan Teknis Operasional Program Mitra Desa Mandiri Kesehatan dan Ekonomi*. Tim Koordinasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat kabupaten Luwu Timur, 2013.
- Sachs, Jeffrey D., dan Andrew M. Warner. "Natural Resources and Economic Development, The Curse of Natural Resources." *European Economic Review* 45 (2001): 827–38.
- Safar zad, Reza, Ehsan Farahnaki, dan Mohamad Farahbakhsh. "Corporate Social Responsibility, Theories and Models." *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology* 5, no. 1 (2017): 38–44.
- Visser, Wayne. "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility." *CSR International Inspiration Series*, no. 8 (2010).
- Welker, M. *Enacting the Corporation. An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 2014.
- World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future (OCF)*. Reprinted. Oxford: Oxford University Press, 2009.

